

## Dinasti Politik dan Demokrasi di Aras Lokal

Nur Quma Laila<sup>1</sup>, Hasse Jubba<sup>2</sup>

<sup>1</sup>IA Scholar Foundation

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
[hasse@umy.ac.id](mailto:hasse@umy.ac.id)

### Abstract

*This paper aims to describe the practice of dynastic politics that occurred in Banten and the strategies carried out by local elites in carrying out dynastic politics. In addition, this paper also aims to analyze how the impact caused by the existence of dynastic politics in Banten. This article is based on data obtained from literature studies where the literature used comes from journal articles, theses, and is accompanied by those that are relevant to the research topic. The collected data is then processed and analyzed using descriptive analysis techniques. The results of the study indicate that the practice of dynastic politics can be seen from the mapping of the power network followed by members of the Ratu Atut Chosiyah (RAC) family. The practice of dynastic politics was carried out with several strategies ranging from violent positioning, branding and segmenting to attract voters to placing relatives in many government and business positions. The dynastic politics not only causes the low political participation of the people but also shows the low quality of democracy in Banten. This paper concludes that democratization that gives power to the people is actually used by the oligarchic regime through the practice of dynastic politics for their own interest.*

**Kata kunci:** Dynasty Politics, Democracy, Local Politics, Political Strategy

### 1. PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi yang dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat lokal justru menyebabkan ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya. Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada elit lokal telah memunculkan formasi keluarga politik yang mendominasi lanskap politik lokal (Fitri, 2019). Fenomena kehadiran politik dinasti—terutama di aras lokal—dalam lanskap paradoks konsolidasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia terbukti cukup masif. Merujuk pada data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) tahun 2013, terdapat peningkatan politik dinasti dari 3 persen (57 orang) (Hasibuan, 2013) naik menjadi 11 persen (524 kepala daerah) (Kompasiana.com, 2013). Data yang dirilis Kemendagri hanya menampilkan praktik politik dinasti di ranah eksekutif, meskipun kenyataannya fenomena politik dinasti ini juga memperlihatkan gejala persebaran dan perluasan (proliferasi) ke arena kekuasaan dan jabatan-jabatan politik di lembaga legislatif, pusat maupun daerah (Sutisna, 2017).

Studi mengenai dinamika politik lokal cenderung dibahas dalam tiga perspektif. *Pertama*, politik lokal cenderung dilihat dalam kaitannya dengan kontestasi antar elite dalam politik lokal (Yuliawati, F., & Agung, 2011, Suhartono et al., 2019; Taqwadin, 2020). Ketegangan antar aktor dan tarik ulur kepentingan menjadi konflik politik lokal dan menjadi arena pertarungan antar elite dalam mengukuhkan kekuatan masing-masing (Yuliawati, F., & Agung, 2011). *Kedua*, politik lokal cenderung dilihat dalam perspektif dinamika etnisitas dalam hal ini politik identitas (Fikri, 2018; Haboddin, 2012). Gerakan politik identitas digunakan oleh para politisi dan penguasa di tingkat lokal untuk mendapatkan kekuasaan, baik bidang politik maupun ekonomi (Haboddin, 2012). *Ketiga*, politik lokal cenderung dilihat dalam perspektif kuasa negara pada ranah politik lokal (Wijayanti, 2016; Winengan, 2016; I. Akbar, 2017). Pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijakan pemerintah (Wijayanti, 2016). Dari ketiga kecenderungan tersebut tampak bahwa studi mengenai politik lokal kurang melihat adanya potensi politik dinasti yang digunakan oleh aktor atau elite lokal sebagai akibat dari adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang dianggap mampu menjadi jembatan dalam demokrasi di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, studi ini menjadi respon atas kurangnya studi yang ada yang melihat desentralisasi justru sebagai penyebab ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya. Desentralisasi merupakan refleksi dari hubungan antara pusat dan daerah yang akan terus berlangsung dalam proses demokratisasi (Prasojo & Kurniawan, 2008). Ketimpangan distribusi ditandai oleh menguatnya relasi bisnis-politik yang menempatkan para aktor pemilik basis sumber daya terkuat sebagai figur paling dominan pada arena politik. Studi ini mengambil kasus salah satu praktik politik dinasti di Indonesia. Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa demokratisasi lokal merupakan sebuah keharusan di era otonomi daerah di mana pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tolak ukur kemajuan demokrasi suatu negara. Namun di balik idealisme tersebut, justru terjadi peristiwa sebaliknya di mana oligarki yang merupakan musuh dari demokrasi tumbuh subur dan meluas. Hal ini tampak dari kemenangan sejumlah kepala daerah yang membangun kekuasaannya melalui kekuatan dinasti politik sebanyak 57 kepala daerah (CNN Indonesia, 2021). Selain itu beberapa daerah dipimpin oleh kepala daerah yang memperluas jaringannya dengan menempatkan keluarganya pada posisi-posisi strategis di pemerintahan seperti yang terjadi pada Bontang, Nganjuk dan Nagan Raya (Aklima & Ramadhan, 2019; Akbar & Purnomo, 2019; Hermansyah & Adi, 2017).

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Dinamika Politik Lokal dan Kemunculan Politik Dinasti di Indonesia**

Konsepsi politik lokal merupakan istilah yang dipergunakan untuk mengilustrasikan tentang aktivitas perpolitikan yang terjadi pada pemerintah daerah dan

tidak lepas dari makna desentralisasi yang merupakan suatu prinsip ideologis yang berkaitan erat dengan tujuan *self-reliance*, pembuatan kebijakan yang demokratis dan pengembangan partisipasi masyarakat (Yusuf, 2019). Politik lokal secara sederhana dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan politik yang berada pada level lokal. Dalam hal ini, semua hal yang berkaitan dengan politik seperti halnya pemerintahan lokal, pembentukan kebijakan daerah, maupun pemilihan kepala daerah (Utomo, 2012). Politik lokal juga seringkali diartikan sebagai interaksi antar aktor dalam satu wilayah sehingga mencetuskan dinamika politik di dalamnya (Agustino, L., & Yusoff, 2010). Politik lokal bukanlah semata-mata merupakan desain 'netral' untuk membawa demokrasi ketingkat lokal namun politik lokal merupakan sebuah arena kontestasi bagi pelbagai kepentingan ekonomi dan politik untuk menentukan bagaimana kekuasaan dan sumberdaya akan didistribusikan (Utomo, 2012).

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan sistem politik lokal adalah pemilihan kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat propinsi secara langsung yang disebut Pilkada (pemilihan kepala daerah). Upaya untuk membangun demokrasi di tingkat lokal dengan pelibatan rakyat secara penuh merupakan alasan penyelenggaraan pilkada (Yani, 2007). Dalam sejarah politik lokal di Indonesia terbagi dalam beberapa tahapan masa yaitu penjajahan kolonial Belanda; penjajahan kolonial Jepang; pasca kemerdekaan tahun 1945; Republik Indonesia Serikat tahun 1948-1949; Demokrasi Parlementer; Demokrasi Terpimpin; Orde Baru; dan Pasca Orde Baru (Sudirman, 2012). Teori *weak strong society* menjelaskan mengenai realita politik lokal di Indonesia pasca Orba yang sangat kuat dengan memenjarakan pikiran dan perilaku warga masyarakat dimana demokrasi berjalan terus, kekuatan pusat beralih ke daerah dan kekuatan-kekuatan lain muncul di daerah dengan suasana yang hampir sama dengan suasana rezim Orba. Penguasa modal terus bergerilya untuk tetap eksis dalam pebisnisannya dan elit-elit serta aktor-aktor politik yang tidak jauh dari pengaruh penguasa (Utomo, 2012).

Politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan (Susanti, 2018). Atau dengan kata lain, sistem politik dinasti digunakan untuk mengakomodasi hubungan yang lebih pribadi tanpa melihat kemampuan, sehingga dapat merusak sistem demokrasi yang dibangun (Hidayati, 2014). Dinasti politik menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan kerabat kepala daerah untuk menjadi pejabat publik (Susanti, 2018). Praktik politik dinasti ini kemudian dapat merusak demokrasi karena kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi (*checks and balances*) menjadi lemah (Mietzner, 2009). Politik dinasti mempersulit munculnya calon alternatif bagi rakyat karena aktor politik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memenangkan pemilihan umum sehingga menyebabkan rendahnya kualitas calon kepala daerah dan dapat mempengaruhi pengelolaan dana publik dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah (Querubin, 2016). Demikian pula, politik dinasti dapat melemahkan kompetensi politik,

mengurangi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, membuat kekuasaan politik menjadi terpusat dan melanggengkan hubungan patron-klien dalam politik tradisional (Mendoza et al., 2012).

Politik dinasti dapat dilihat pada dua hal. *Pertama*, ia merupakan mekanisme untuk menumpuk harta yang melimpah dan mempertahankan kekuasaan politik keluarga. *Kedua*, politik dinasti dijadikan sebagai benteng untuk menutupi rekam jejak sejarah hitam dan koruptif yang dilakukan jaringan dinasti keluarga pada era sebelumnya (Sembiring & Simanihuruk, 2018). Setidaknya, terdapat empat faktor pendorong merebaknya politik dinasti, khususnya yang terbelit persoalan penyalahgunaan kekuasaan, yakni (1) ambisi kekuasaan yang besar dari para pelaku politik dinasti yang cenderung berusaha mempertahankan dan memperbesar kekuasaan, di berbagai jabatan kekuasaan dan wilayah kekuasaan, (2) partai politik sebagai kendaraan politik cenderung berperilaku pragmatis sehingga tidak mendasarkan pada kompetensi, integritas dan *track record* calon kandidat kepala daerah, (3) budaya politik masyarakat yang menerima kehadiran dinasti politik, (4) ketiadaan regulasi yang membatasi politisi dari suatu dinasti untuk mengikuti kompetisi dalam pemilihan umum/Pilkada (Asrinaldi, 2019). Selain itu, terdapat berbagai pertimbangan lainnya seperti tuntutan masyarakat, lingkungan, maupun kondisi tertentu yang kemudian mendorong adanya politik dinasti (Djati, 2015).

### **Strategi Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah**

Strategi politik merupakan seperangkat metode untuk dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan dan strategi yang digunakan untuk merealisasi tujuan politik (Anggoro, T., & Mulyatin, 2019). Dalam hal ini, strategi politik adalah sebuah kerangka langkah atau rencana yang digunakan dalam rangka merealisasikan cita-cita politik (Gunawan, G., Bainus, A., & Paskarina, 2020). Ini merupakan imbas dari proses reformasi yang terjadi dimana proses politik menjadi lebih berdinamika, hingga akhirnya dibutuhkan strategi politik untuk memenangkan hati dan meraih simpati konstituen sebagai penentu dari suatu keputusan politik. Secara umum strategi politik dilakukan dengan melakukan pencitraan politik yang di dalamnya terdapat pengemasan terhadap suatu objek pelaku politik baik perseorangan maupun partai politik untuk mempengaruhi persepsi, perasaan, kesadaran, dan opini publik sehingga publik dapat digiring ke suatu preferensi, pilihan dan keputusan politik tertentu (Azhar, 2017). Dengan kata lain, strategi politik pencitraan digunakan sebagai media untuk mempublikasikan akuntabilitas politik para kontestan politik (Azhar, 2017).

Memenangkan suatu kompetisi politik memerlukan strategi politik agar kemenangan politik, baik itu berupa dukungan politik maupun perolehan suara dalam pemilu bisa diperoleh secara efisien dan efektif (Sahea, R., Niode, B., & Tulung, 2018). Dalam strategi politik, para kandidat melakukan pendekatan dan komunikasi politik untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh pada saat

pencoblosan, juga untuk mengidentifikasi strategi pendekatan yang diperlukan terhadap masing-masing kelompok pemilih (Inkiriwang, 2021). Ruang-ruang publik, termasuk dalam berbagai media, menjadi ruang ekspresi yang tidak terlepas dari berbagai manuver, taktik, dan strategi politik yang dilakukan oleh elit politik (Azhar, 2017). Secara umum praktik penggunaan strategi politik mengacu pada dua pola dasar yakni (1) pola ofensif (menyerang) dimana pola ini diperlukan bilamana seorang kandidat/partai politik ingin menarik pendukung baru maupun memperluas jumlah dukungan masyarakat. Biasanya kandidat maupun partai politik yang menggunakan pola strategi ofensif ini lebih dikenal sebagai pihak penantang maupun “pendatang baru” yang akan berkompetisi untuk mengincar kursi kekuasaan, dan (2) pola defensif (bertahan) yang digunakan politisi pemegang kekuasaan maupun partai politik penguasa yang ingin terus berupaya mempertahankan kekuasaannya atau tetap menjaga dominasinya (Inkiriwang, 2021).

### 3. METODE PENELITIAN

Artikel ini dibangun dari data yang diperoleh dari literatur atau studi pustaka yang dilakukan. Studi pustaka dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang sesuai dengan topik penelitian terutama literatur yang berbicara mengenai dinasti politik di Banten. Di antara literatur yang dijadikan dasar adalah literatur (Hamid, 2013) yang berbicara mengenai peran aktor politik budaya di Banten; literatur (Agustino, L., & Yusoff (2010) yang membahas mengenai perubahan politik lokal di Indonesia dari otokratik ke reformasi politik; dan literatur Darmansyah et al., (2020) yang membahas mengenai prototipe praktik dinasti politik dalam pengisian jabatan administratif.

Kajian mengenai daerah ini dipilih karena menjadi perhatian publik Indonesia secara luas. Namun demikian, data yang diperoleh tidak secara langsung dikumpulkan dari lapangan, tetapi diakses melalui kajian-kajian atau karya-karya ilmiah yang telah dihasilkan oleh para peneliti dan ahli. Oleh karena itu, sifat dari kajian ini adalah studi pustaka yang membasiskan data pada sumber tertulis atau literatur tertulis. Demikian pula, penyebutan identitas pihak yang terlibat dalam dinasti politik tidak disembunyikan karena telah dipublikasikan melalui karya ilmiah secara meluas. Penulis hanya mengutip pendapat dari para peneliti dan ahli sebelumnya.

Literatur yang digunakan adalah literatur yang berasal dari artikel jurnal, tesis, dan disertai yang relevan dengan topik penelitian. Artikel jurnal yang dijadikan sumber bahan berupa karya ilmiah yang telah dipublikasikan khususnya pada jurnal-jurnal nasional. Literatur berupa tesis magister dan disertasi doktor pun demikian, diperoleh melalui penelusuran ke pustakaan. Ketiga sumber data ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa kajian-kajian tersebut telah melalui berbagai tahapan pengujian sehingga secara akademik dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Sumber-sumber tersebut diperoleh secara *online* dan *offline* (perpustakaan). Literatur yang terkumpul kemudian dibaca dan direduksi dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal yang penting serta membuang hal yang tidak perlu sesuai rumusan

masalah yang ingin dijawab. Setelah direduksi, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis. Data kemudian disajikan dengan bentuk narasi teks seperti yang tersaji dalam artikel ini.

#### 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

##### Politik Dinasti di Banten

Politik dinasti di Provinsi Banten dapat ditelusuri melalui pemetaan jaringan kuasa. Secara historis, dinasti politik di Banten dimulai dari Chasan Shohib (CS), seorang pebisnis yang memiliki perusahaan besar di daerah ini. Selain sebagai pebisnis, ia juga merupakan aktor pemerintahan lokal yang menduduki jabatan penting dalam banyak organisasi strategis di masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam struktur masyarakat Banten) (Hamid, 2013). CS juga menjadi salah satu aktor utama dalam terbentuknya Provinsi Banten. Pada masa Orde Baru, ia sangat bergantung pada koneksi dengan pejabat sipil dan militer namun tidak aktif dalam merancang siapa yang berkuasa di Jawa Barat (Sukri, 2020). Peran ini berlanjut di Provinsi Banten. Jaringan kekuasaan dibentuk oleh elite lokal ini dimulai dengan naiknya Ratu Atut Chosiyah (RAC), yang merupakan anaknya, sebagai Wakil Gubernur Banten tahun 2002. RAC tercatat tiga kali menduduki posisi penting dalam pemerintahan Banten yakni Wakil Gubernur Banten pada tahun 2002, Gubernur Banten tahun 2006, dan terpilih kembali menjadi Gubernur Banten pada tahun 2011. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam tabel perolehan suara RAC sebagai berikut;

Tabel 4.1  
Presentase Perolehan Suara RAC tahun 2002, 2006 dan 2011

Tahun Pemilihan	Posisi	Presentase Suara RAC
2002	Wakil Gubernur	53,62%
2006	Gubernur	40,15%
2011	Gubernur	49,64%

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

Jaring kekuasaan kemudian menggurita di mana jejak politik RAC diikuti oleh anggota keluarga lainnya dengan menduduki beberapa jabatan. Setidaknya 10 orang anggota keluarga RAC menduduki jabatan-jabatan strategis publik. Tercatat Hikmat Tomet (suami) menjadi anggota DPR (2009-2014), Andika Hazrumy (anak pertama) menjadi Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022, Andiara Aprilia (anak kedua) menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Banten periode 2019-2024, Tanto (menantu) menjadi Wakil Bupati Pandeglang periode 2015-2020, Ade Rossi Khaerunisa (menantu) menjadi DPRD Kota Serang, Ratu Tatu Chasanah (adik kandung) menjadi Bupati Serang periode 2015-2020, Tubagus Haerul Jaman (adik tiri) menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024, Ratu Ria Maryana (adik tiri) sebagai Ketua DPD Golkar Kota Serang periode 2020-2025 sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Ratu Lilis (adik tiri) mantan Ketua DPD Golkar Kota Serang,

Airin Rachmi Diany (adik ipar) Wali Kota Tangerang Selatan periode 2016-2021, Aden Abdul Cholik (adik ipar) anggota DPRD Banten, dan Ratna Kumalasari (ibu tiri) menjadi anggota DPRD Pandeglang (Gunanto, 2020).

Jaringan kekuasaan tersebut menunjukkan bahwa keluarga CS telah memanfaatkan jaringan kekerabatan yang kuat dan merebut birokrasi lokal untuk memperkuat mesin politiknya serta mengkonsolidasikan kekuatan politik di arena lokal. Ikatan keluarga menjadi sumber kekuatan tradisional yang kuat dan penting dimana setelah tahun 2004 kekuasaan politik terutama didistribusikan diantara anggota keluarganya dan setelah kematiannya pada tahun 2011 kekuasaan dialihkan ke anak-anaknya (Hamid, 2014). Dinasti politik Banten telah berdiri kokoh seiring dengan usia Provinsi Banten sehingga jaringan kekuasaan telah tersebar kuat di pemerintahan. Dengan kata lain, desain dinasti politik Banten bernuansa aji mumpung dengan mendompleng kekuasaan kerabat (Effendi, 2018). Hal ini sejalan dengan konsep familisme dalam kajian ilmu sosial dan politik dimana familisme sebagai budaya politik diartikan sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, yang melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya (Effendi, 2018). Hal ini nampak ketika dinasti politik Banten memperluas dominasinya dengan memanfaatkan jaringan kekerabatan untuk menembus politik Banten dan pada akhirnya mengendalikan dan mempertahankan cengkeramannya atas birokrasi dan politik lokal.

### **Strategi Elite Lokal Banten dalam Mempertahankan Politik Dinasti**

Dinasti politik berangkat dari diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada elit lokal. Chasan Shohib sebagai elit lokal dalam pembentukan Provinsi Banten memanfaatkan hal tersebut untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan politiknya melalui perannya sebagai pimpinan Pendekar Banten (Perkumpulan Banten Jawara). Chasan Sohib mengerahkan jawara untuk mengintimidasi warga untuk memilih putrinya Atut Chosiyah, sebagai wakil Gubernur Banten pada tahun 2001 (Hamid, 2014). Ia sebagai *local strongmen* di daerahnya kemudian membentuk dinasti politik lokal yang lebih terpusat dan terprogram dengan menempatkan beberapa sanak keluarga dan kroni mereka di banyak posisi, baik pemerintahan maupun dunia bisnis (formal ataupun informal) (Agustino, L., & Yusoff, 2010). Dengan menempatkan Ratu Atut di pos penting pemerintahan, Chasan Shohib mampu mempengaruhi pengambilan keputusan politik di provinsi. Dengan demikian, kekuatan politik dan sumber daya ekonomi di Banten menjadi terkonsentrasi di tangannya. Untuk mempertahankan kekuasaannya tersebut, Sohib menggunakan kekerasan untuk menegaskan kekuasaan politik dalam masyarakat lokal dan mengancam siapa saja yang mempertanyakan jaringan monopoli keuangan di Banten dan mengintimidasi siapa saja yang melakukan protes atas ketidakpuasan sosial (Hamid, 2014).

Namun demikian, strategi politik Chasan Shohib dengan cara kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya berganti sejak dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dimana di bawah undang-undang baru ini, gubernur dan wakilnya tidak lagi diangkat oleh DPRD, melainkan diangkat melalui pilihan langsung oleh rakyat (Pilkada / pemilihan langsung). Hal ini kemudian mempengaruhi strategi politik Chasan Shohib yang sadar akan kebutuhannya untuk mendapatkan dukungan masyarakat sehingga ia tidak lagi menggunakan kekerasan. Peran jawara kemudian tergantikan oleh Relawan Banten (RBB) yang diprakarsai oleh Chasan Sohib untuk membangun citra yang lebih positif dengan mempromosikan prestasi dan kepemimpinan Chasan Sohib di Banten (Hamid, 2014). RBB selanjutnya dijadikan sebagai mesin politik untuk konsolidasi kekuasaan Sohib dan anak-anaknya.

Strategi politik Chasan Shohib dalam mempertahankan dinasti politik di atas berubah seiring dengan berbagai isu negatif mengenai politik dinasti Ratu Atut Chosiyah. Hal ini misalnya nampak pada pemilihan Airin Rachmi Diany sebagai wali kota Tangerang Selatan periode 2016-2021. Selain menggunakan pengaruh keluarga Ratu Atut dan kendaraan partai Golkar, Airin juga menerapkan strategi kampanye untuk menangkal isu dinasti politik. Hal ini dilakukan guna memenangkan pilkada dan mempertahankan dinasti politiknya. Strategi politik dilakukan dengan melakukan penangkalan isu dinasti politik menggunakan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Airin melakukan propaganda melalui Facebook dan Twitter untuk menyisir pemilih yang berada di kawasan perumahan yang sulit menerapkan strategi tatap muka. Strategi ofensif digunakan Airin dengan mengangkat tema yang aktual dan menciptakan isu positif lainnya (mengangkat isu baru dengan menampilkan kesuksesan Airin selama memerintah dapat meredam isu-isu negatif tersebut) (Maulidina, 2017).

Hal yang hampir sama juga dilakukan oleh Andika Hazrumy yang merupakan anak pertama Ratu Atut pada pilihan Gubernur Banten tahun 2017. Pada pemilihan Gubernur ini, Andika Hazrumy melakukan *positioning*, *branding* dan *segmenting* untuk memenangkan pilihan Gubernur Banten 2017. Andika Hazrumy berpasangan dengan Wahidin Halim yang merupakan mantan lawan Ratu Atut pada Pilihan Gubernur Banten 2012. Kemenangan Wahidin-Andika tidak terlepas dari strategi politik yang digunakannya di mana *marketing* politik dilakukan dengan menonjolkan Wahidin sebagai mantan pemimpin Tangerang yang berhasil dan bersih, dan menampilkan Andika sebagai politikus muda yang potensial sehingga stigma negatif terhadap Andika karena dinasti politik dan korupsi yang dilakukan oleh Ratu Atut bisa dihilangkan (Setiawan, 2018). Andika yang masih muda dapat menarik para pemilih muda dan penggambaran Wahidin yang dengan aksinya yang sering turun ke lapangan berbaur dengan masyarakat meningkatkan figur populisnya (Setiawan, 2018).

### **Dampak Politik Dinasti pada Demokrasi Lokal Banten**

Politik dinasti dipandang sebagai penyakit dalam demokrasi karena mencederai makna demokrasi yang mengandung makna kebebasan khususnya dalam



proses pencalonan dalam kontestasi politik. Dinasti politik telah mengakibatkan melemahnya demokrasi seperti sulit masuknya kritik, pengawasan, maupun *mekanisme checks and balances*, berkembangnya politik dinasti menyebabkan *playing field* mengalami ketimpangan karena politik dinasti sudah mampu mengakumulasi pengaruh, kekayaan, penguasaan terhadap wilayah, maupun kontrol ekonomi tertentu, sehingga memungkinkan persentase kemenangan yang potensial dalam kontestasi politik dibandingkan calon lain yang masih memiliki keterbatasan dalam sumberdaya dan modal (Gunanto, 2020). Tumbuh suburnya politik dinasti menunjukkan institusionalisasi kepartaian yang semakin buruk dan kualitas partai politik yang lemah dalam menjalankan fungsinya dalam rekrutmen dan kaderisasi. Dinasti politik juga menyebabkan melemahnya kekuatan partai politik karena kekuatan kandidat individu menjadi faktor determinan dalam kemenangan kontestasi (Gunanto, 2020).

Dalam politik dinasti di Provinsi Banten, kuatnya akar dinasti politik keluarga Ratu Atut mengakibatkan mudahnya keluarga Atut untuk mendapatkan dukungan dan kendaraan politik dalam mencalonkan diri sebagai kepala atau wakil kepala daerah. Jejaring kekuasaan yang mereka miliki ditambah dengan dukungan partai Golkar sebagai kendaraan politiknya, mempermudah jalan bagi keluarga untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam jabatan publik (Sukri, 2020). Jejaring kekuasaan dalam dinasti politik yang terus membangun jejaring kekuasaan yang kokoh tersebut dapat mengambil alih dan membunuh demokrasi lokal. Jejaring kekuasaan dalam dinasti politik seperti yang terjadi di Banten dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan dan masa depan demokrasi lokal. Sebab, dinasti politik bukan hanya menghilangkan hak rakyat dalam berdemokrasi (Darmansyah et al., 2020), tetapi juga melahirkan pemimpin yang tidak kompeten karena tidak terbuka peluang untuk berkontestasi secara terbuka.

Dinasti politik Banten telah menyebabkan demokratisasi lokal dibajak oleh oligarki-oligarki lokal yang merasionalitaskan sistem tersebut seakan-akan telah demokratis (Maulana, 2013). Dampak dari dinasti politik di Banten bagi demokrasi lokal adalah rendahnya partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik merupakan salah satu syarat utama demi tegak dan berjalannya demokrasi (Purba et al., 2018). Tinggi atau rendahnya partisipasi politik dalam bentuk pemilihan langsung dapat menggambarkan kualitas demokrasi suatu daerah. Rendahnya partisipasi politik di Banten, di mana keluarga Ratu Atut ikut dalam kontestasi tersebut menunjukkan rendahnya kualitas demokrasi di Banten. Kualitas demokrasi dapat dilihat dari tinggi rendahnya partisipasi masyarakat di dalamnya. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan semakin tinggi tingkat demokrasi lokal. Selain itu, adanya politik dinasti di Provinsi Banten telah menyebabkan tidak efektifnya mekanisme *check and balances* sehingga rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi (Hermansyah & Adi, 2017).

---

## 5. PENUTUP

Demokratisasi yang memberikan kuasa kepada rakyat justru dimanfaatkan oleh rezim oligarkis melalui praktik politik dinasti untuk kepentingan mereka sendiri. Kehadiran dinasti politik dalam konteks demokratisasi telah menimbulkan masalah pada kepemimpinan khususnya di aras lokal. Demikian pula, ia telah mengakibatkan stagnasi kepemimpinan dan partisipasi publik yang minim karena semua sektor dikuasai oleh elite atau aktor lokal. Dalam mempertahankan dinasti politiknya, aktor lokal melakukan berbagai cara, meskipun tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, sebagai alat meraih kekuasaan. Dalam konteks upaya demokratisasi dalam perpolitikan Indonesia, kasus Provinsi Banten menunjukkan bahwa politik dinasti telah menjadi fenomena politik yang menggiring pada terpilihnya aktor sentral yang berbasis keluarga sehingga mempengaruhi proses penentuan kekuatan politik dan distribusi sumber daya ekonomi. Akibatnya, kekuasaan politik lokal didominasi oleh ikatan keluarga yang pada akhirnya melemahkan upaya desentralisasi yang digalakkan Pemerintah Indonesia agar masyarakat lokal dapat otonom dan mampu memajukan daerahnya sendiri.

Tulisan ini terbatas pada sisi data teks dimana temuan penelitian bersandar pada data dari literatur terutama yang membahas mengenai dinasti politik pada kasus satu daerah saja. Hal ini mengakibatkan studi ini tidak memiliki otoritas untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat empiris, yang bersumber dari data lapangan yakni observasi yang cermat dan wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam dinasti politik di daerah yang dijadikan kasus studi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk melihat perspektif dari pihak-pihak yang terlibat dalam dinasti politik sehingga penelitian lanjutan dapat dilakukan secara lebih komprehensif, khususnya penelusuran lapangan dengan melihat beberapa daerah yang memiliki kesamaan praktik mempertahankan kekuasaan melalui politik dinasti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2010). Politik lokal di Indonesia: Dari otokratik ke reformasi politik. *Jurnal Ilmu Politik, Edisi, 21, 2010*.
- Akbar, I. (2017). Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *CosmoGov, 2(1), 95*.  
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852>
- Akbar, P., & Purnomo, E. P. (2019). Model Dinasti Politik Di Kota Bontang. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*.  
<http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/25381>
- Aklima, A., & Ramadhan, I. (2019). Politik Dinasti Di Aceh; Studi Kepemimpinan Ampon Bang Di Kabupaten Nagan Raya. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.467>
- Anggoro, T., & Mulyatin, T. C. (2019). Kiprah Politik Purnawirawan. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol, 15(02), 240*. <https://doi.org/10.24042/tps.v15i2.5110>

- Asrinaldi. (2019). Partai Politik Dan Keharusan Verifikasi: Membangun Tata Kelola Pemilu Serentak Yang Berintegritas. *Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan Fisip Umrah 2017*.
- Azhar, A. A. (2017). *Pencitraan Politik Elektoral: Kajian Politik Segitiga PAN Dalam Merebut Simpati Masyarakat*. Atap Buku Yogyakarta, Yogyakarta. ISBN 9786027411470.
- CNN Indonesia. (2021). Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020. *CNN Indonesia, Com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210412184019-32-628960/peneliti-57-calon-dinasti-politik-menang-pilkada-2020>
- Darmansyah, R., Syahrani, S. D., & Harirah MS, Z. (2020). Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif. *Journal of Political Issues*. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.28>
- Djati, W. R. (2015). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*. <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i2.3726>
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>
- Fikri, S. (2018). Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal). *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v18i2.2701>
- Fitri, A. (2019). Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.1333>
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844>
- Gunawan, G., Bainus, A., & Paskarina, C. (2020). Strategi Koalisi Partai Politik Lokal Dan Partai Politik Nasional Dalam Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(1), 51-68. <https://doi.org/10.20414/politea.v3i1.1826>
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal. *Journal of Government and Politics*. <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>
- Hamid, A. (2013). Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru: Studi Kasus Kiai dan Jawara di Banten. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*.
- Hamid, A. (2014). A Family Matter: Political Corruption in Banten, Indonesia. *Asian Politics and Policy*. <https://doi.org/10.1111/aspp.12136>

- Hasibuan, U. S. (2013). Ambang Batas Dinasti Politik. *Kompas.Com*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2013/04/11/09394434/~Nasional>
- Hermansyah, F., & Adi, A. S. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*.  
<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/30/article/view/21089>
- Hidayati, N. (2014). Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial*, 10(1).  
<http://dx.doi.org/10.32497/orbith.v10i1.357>
- Inkiriwang, M. J. (2021). Strategi Politik Para Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilu 2019. *Jurnal Politico*, 10(1).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/31502>
- Kompasiana.com. (2013). 298 dari Total 524 Kepala Daerah di Indonesia Tersangkut Korupsi. *Kompasiana.Com*.  
<https://www.kompasiana.com/idhamabdinusa/552f9e4e6ea834b47e8b4570/298-dari-total-524-kepala-daerah-di-indonesia-tersangkut-korupsi>
- Maulana, D. (2013). Fenomena Demokratisasi Lokal Di Provinsi Banten. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 2(2), 24-46.  
<https://doi.org/10.30656/sawala.v2i2.508>
- Maulidina, S. and S. (2017). Analisis Strategi Kontra Isu: Studi Kasus Tim Media Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2015. *Jurnal Renaissance* 2(1). <http://dx.doi.org/10.53878/jr.v2i01.42>
- Mendoza, R. U., Beja, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. B. (2012). Inequality in democracy: Insights from an empirical analysis of political dynasties in the 15th Philippine Congress. *Philippine Political Science Journal*.  
<https://doi.org/10.1080/01154451.2012.734094>
- Mietzner, M. (2009). Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System. In *Sydney: Lowy Institute for International Policy*.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*.
- Purba, H. D., Nasution, M. A., & Warjio, W. (2018). Partisipasi Politik Kader Perempuan Parpol Dalam Pilkada Di Kabupaten Karo. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*.  
<https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.9966>

- Querubin, P. (2016). Family and politics: Dynastic persistence in the philippines. *Quarterly Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1561/100.00014182>
- Sahea, R., Niode, B., & Tulung, T. (2018). Analisis Strategi Politik Sri Wahyumi Maria Manalip-Petrus Simon Tuange Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. *Jurnal Eksekutif*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21561>
- Sembiring, R., & Simanihuruk, M. (2018). Politik Dinasti dan Desentralisasi. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.148>
- Setiawan, D. E. (2018). *Strategi Marketing Komunikasi Politik Pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy pada Pemenangan Pilkada Provinsi Banten 2017*. Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sudirman, S. (2012). Dinamika Politik Lokal dalam Social Capital (Modal Sosial). *Academica*, 4(1), 741-760.
- Suhartono, E., Pelly, U., Azhari, I., Etnisitas, U., Iii, B., & Publisher, C. (2019). Rendahnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015; Suatu Tinjauan Antropologi Politik Low Voter Participation in The 2015 Mayor and Deputy Mayor Election Field; A Review of Political Anthropology Universitas Nege. *Jurnal Antropologi Sumatera*, 17(1), 12–29. <https://doi.org/10.24114/jas.v17i1.20022>
- Sukri, M. A. (2020). Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i2.8316>
- Susanti, M. H. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Sutisna, A. (2017). Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9329>
- Taqwadin, D. A. (2020). Dinamika Elit Lokal Di Aceh Terhadap Penguasa. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 5(2), 203–225. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.552>
- Utomo, G. S. (2012). *Relasi Kekuatan-Kekuatan Politik Lokal Dalam Pemenangan Pilkada di Mojokerto*. Universitas Airlangga.
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal*

---

*Media Hukum*. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>

- Winengan. (2016). Kuasa Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik Di Aras Lokal ( Studi Pada Kebijakan Pembebasan Lahan Kawasan Mandalika Resort di Lombok ) Winengan Universitas Islam Negeri Mataram. *Jurnal Review Politik*, 06(2), 367–387.
- Yani, A. A. (2007). Budaya Politik Orang Bugis dalam Dinamika Politik Lokal. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*, 9(2), 7.
- Yuliawati, F., & Agung, S. (2011). Pertautan Kepentingan Antar Elit: Studi Tarik Ulur Kepentingan Politik Antar Elit Dalam Pembentukan Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 3(2), 453-470. <https://doi.org/10.37058/jipp.v3i2.2681>
- Yusuf, I. M. (2019). Budaya Politik Lokal Dalam Proses Legislatif Di Daerah. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(4), 667-676.